

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai determinan tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. PDRB per kapita memiliki hubungan positif, namun belum berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat sehingga belum mampu mendorong perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh sumber pendapatan yang memadai, sehingga peningkatan pengangguran berkaitan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Perbedaan struktur pasar kerja antarkabupaten menyebabkan manfaat kebijakan UMK lebih banyak dirasakan oleh pekerja sektor formal, sedangkan sebagian besar tenaga kerja pada sektor informal belum memperoleh dampak yang sama terhadap peningkatan kesejahteraan.

4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki hubungan positif, namun belum berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Peningkatan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung karena masih dipengaruhi oleh keberlanjutan pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Kondisi kesehatan yang semakin baik mendukung produktivitas masyarakat dalam bekerja dan memperoleh pendapatan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

5.2.1 Bagi Pemerintah

1. Pemerintah daerah perlu mendorong agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya meningkatkan nilai PDRB per kapita, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat. Penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses permodalan dapat dilakukan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat usia produktif. Program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-

masing kabupaten perlu diperkuat agar masyarakat memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan layak.

3. Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota perlu diimbangi dengan perluasan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, manfaat kebijakan pengupahan dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja, termasuk melalui peningkatan daya saing tenaga kerja lokal untuk memasuki sektor formal.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan, terutama melalui upaya menekan angka putus sekolah dan perkawinan usia dini. Peningkatan akses pendidikan hingga jenjang menengah dan tinggi diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang dalam pengurangan kemiskinan.
5. Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pemerataan akses fasilitas kesehatan. Penguatan layanan kesehatan dasar, puskesmas, dan program promotif-preventif penting dilakukan agar kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga dan produktivitas tenaga kerja dapat terus meningkat.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti inflasi, infrastruktur, investasi, jumlah penduduk, serta faktor sosial ekonomi lainnya yang belum dimasukkan dalam model penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar perubahan variabel, terutama pendidikan dan kesehatan, dapat

diamati secara lebih komprehensif sebagai investasi modal manusia dalam jangka panjang.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan membandingkan Wilayah Tapal Kuda dan kawasan lain di Jawa Timur untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik determinan kemiskinan antarwilayah.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan indikator yang lebih spesifik dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan karakteristik pasar kerja, sehingga hubungan antara pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan dapat dianalisis secara lebih mendalam.